

TAJUK RENCANA

Hentikan Ketergantungan Impor

**PRESIDEN** Jokowi menginstruksikan agar Indonesia mengurangi ketergantungan pada kedelai impor harus dilakukan. Presiden ingin kedelai kita tidak 100% tergantung kiriman luar negeri (KR 20/9).

Rencana dan imbauan untuk menyvetop ketergantungan pada produk luar negeri khususnya kedelai sebenarnya sudah lama. Gerakan untuk menghentikan ketergantungan tersebut sebenarnya sudah beberapa kali, ketika harga kedelai melambung, pedagang kecil tak mampu lagi membeli. Sehingga sejumlah perajin tempe bangkrut. Atau pedagang tahu mampu menyutuskan barang dagangan.

Saat itu, tahun 2018 dikatakan masih ada empat juta hektare lahan yang dapat disiapkan menjadi lahan kedelai untuk memenuhi kekurangan produksi. Sehingga Kementerian Pertanian menyatakan dalam waktu dekat akan dikembangkan lahan kedelai. Optimis yakin dua tahun ke depan (waktu itu) 2020, bisa diwujudkan. Namun ternyata belum bisa.

Saat ini kebutuhan produksi sekitar 2,4 juta ton, turun terus. Menko Perekonoimian Airlangga Hartarto menyatakan produk nasional turun karena petani memang banyak yang enggan menanam kedelai. Sebab petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp 10.000 per kilogram. Sebab akan kalah dengan harga impor dari AS yang hanya Rp 7.700 atau bisa lebih murah lagi. Inilah salah satu penyebab mengapa petani menghindari menanam kedelai.

Tahun 2018 produksinya masih 700.000 hektare, kini menurun pada 150.000 hektar. Kemana mereka lari? Yang mereka memilih menanam jagung yang lebih menguntungkan. Menurut para petani, lahan yang dipunyai sekarang makin sempit karena banyak yang dijual. Dalam lahan sempit tersebut, mereka memilih tanaman yang lebih menguntungkan. Selain itu, tak banyak bibit kedelai yang berkualitas yang bisa ditanam agar lebih menghasilkan

hasil yang berkualitas. Sehingga bisa mendorong harganya.

Hambatan lain tersebut, mengenai benih-benih berkualitas. Sehingga, produksi kedelai menjadi minim. Pemerintah dianggap sampai hari ini belum mengembangkan benih-benih unggul, benih-benih lokal kita yang banyak itu belum banyak dikembangkan. Jadi akibatnya produksi nasional kita dari yg dulunya bisa memenuhi 70-80% sekarang terbalik cuma 20%. Kita jadi impor.

Namun soal bibit unggul, pemerintah kini sudah menyiapkan bibit unggul yang direkayasa secara genetik atau *genetically modified organism* kedelai yang dinamakan GMO. Dengan bibit unggul tersebut diharapkan produksi per hektare bisa melonjak beberapa kali lipat. Selama ini harga jagung sama dengan kedelai Rp 5.000 per kilogram. Dalam area sama, kalau jagung bisa ber hektarenya 6-7 ton, namun kedelai hanya 1, 5 ton.

Maka stratgei yang digunakan untuk mendorong agar mengurangi ketergantungan, di antaranya adalah mendorong agar petani tetap menanam kedelai. Presiden telah meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli harga dari petani sesuai harga yang sudah ditentukan. Presiden mengasikan BUMN agar bisa membelai kedelai dari petani di harga Rp 10.000,-.

Selain itu, diharapkan program insentif lainnya juga agar kreatif sesuai kebutuhan, agar kapasitas produksi nasional meningkat. Misalnya dengan pemberian subsidi harga, subsidi sarana produksi, pengadaan alat mesin dan introduksi tata niaga kedelai yang baik dan efisien serta penyuluhan dan pendampingan petani yang efektif. Dengan demikian harapan untuk mengurangi ketergantungan bisa tercukupi. Presiden juga telah menekankan, bahwa impor boleh saja, namun menanam sebanyak-banyak dari dalam negeri, tentu akan lebih menarik. (\*\*)

**PIKIRAN PEMBACA**

Naskah bisa dikirim Email atau WA



**pikiranpembaca@gmail.com**



**0895-6394-11000**

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian,SARA dan Hoaks.  
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Menanti Pencerahan Politik dari Kampus

**SILATURAHMI** politik mulai gencar dilakukan elite politik. Namun janganlah hal ini membuat warga terkecoh dan hendaknya juga cerdas membaca arah politik yang ada. Meski sebenarnya hal ini bukan hal mudah bagi masyarakat. Mengingat sekarang banyak sumber yang kadangkala malah mengecoh kita.

Kami rindu adanya pendidikan politik yang netral, yang bukan merupakan indoktrinasi politik elite partai. Mungkinkah perlu menunggu kalang-

an kampus melakukan pencerahan? Mungkinkah KKN mahasiswa sekarang mengisi pencerahan dan pendidikan politik agar masyarakat bisa tahu bagaimana memilih dengan cerdas? Pendidikan politik seperti menjelang Pemilu 1999, pascareformasi dulu. Saya kiri ini menjadi harapan banyak orang dan kami menunggu. Meski saya tahu bagi kalangan kampus pun ini bukan hal mudah. □

*Lilik, Bogeman Magelang*

Sekarang Dunia Seluas Daun Kelor

**DULU** orang tua sering memberi wejangan, nasehat dengan kalimat : *Donya ora mung sak godhong kelor*. Maksudnya, jangan mudah putus asa apalagi patah hati, karena sesuatu yang menyakitimu. Banyak hal lain yang bisa dilihat selian sesuatu tersebut. Dengan demikian, kita tidak akan mudah putus asa.

Namun sekarang kita akan mengatakan dunia itu hanya seluas daun kelor. Bagaimana tidak? Karena apa yang terjadi di belahan bumi lain akan segera kita ketahui, hanya dalam hi-

tungan menit. Bahkan yang menarik - atau membuat prihatin? - ketika banyak tempat wisata yang menawarkan miniatur-miniatur icon manca : Menara Eiffel, Kincir Angin, Spinx dan lainnya di banyak kota di Indonesia. Bahkan ada nuansa Jepang di Bantul dan lainnya.

Dunia sekarang memang menjadi sempit. Karena benda pipih Bernama gawai, gadget, handphone dan lainnya. Jadi sekarang, dunia seluas daun kelor. □

*MBah Hadi, Manyaran Wonogiri*

Pernikahan Dini, 'PR' Besar Yogya

Fadmi Sustiwi

ga pemahaman agama yang sempit, menjadi dasarnya permohonan tersebut. Termasuk tentu saja, pergaulan tidak sehat, minimnya pengetahuan reproduksi sehat yang ditambah minimnya pengawasan.

Problema pernikahan anak atau



KR-JOKO SANTOSO

**KETIKA** dinyatakan kembali sebagai provinsi layak anak (provila) untuk keempat kali, harian ini lewat tajuknya (KR, 1/8) sudah mengingatkan, agar seoygianya tidak hanya bicara soal indikator dan proses namun juga *outcome* kualitas anak. Selain merebaknya klithih maka tantangan lain yang dihadapi DIY adalah tingginya angka pernikahan dini. Ini harus mendapat perhatian. Artinya, pernikahan dini merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian serius pula.

Pekan lalu, Ketua Tim Kajian Pernikahan Dini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Warih Andan Puspita di kantornya mengungkap fakta mencengangkan. Menurutnya, selama tiga tahun terakhir, *trend* angka kasus pernikahan dini mengalami kenaikan. Data 2019 mencatat terdapat 394 kejadian. Angka itu melesat di tahun 2020 menjadi 948. Meski tahun 2021 sedikit turun di angka 757 kasus, namun semua ini perlu perhatian bersama. Warih bahkan menyebut ini butuh perhatian serius dan menjadi 'PR' bersama. (KR, 17/9).

Dampak Panjang

Harus diakui, pernikahan dini bak persoalan laten bangsa. Apalagi juga memiliki dampak sangat panjang : ekonomi, kesehatan mulai kesehatan psikhis, fisik dan kesehatan reproduksi bahkan juga berdampak sosial. Namun kasus ini seakan terus berulang. Peraturan hukum UU Perkawinan yang sudah diperbaiki ñ usia nikah adalah 19 tahun, sama antara lelaki perempuan — seakan tidak memengaruhi. Informasi pengetahuan mengenai dampak negatif pernikahan dini, seakan tidak berarti. Benarkah?

Fakta bila permohonan izin atau dispensasi menikah, terus bertambah meski usia nikah sudah ditingkatkan, tidak bisa dielakkan. Kian miris, ketika 80% alasan utamanya permohonan izin menikah adalah akibat kehamilan tidak dikehendaki. Persoalan ekonomi, budaya dan ju-

pernikahan dini, bukanlah persoalan baru. Di Indonesia, masalah ini bahkan sudah dibahas sejak hampir seabad silam. Jika bangsa ini tidak lupa sejarah, pasti mengingat ketika sejumlah tokoh dalam Kongres Perempoean I juga membahas persoalan pernikahan anak. Bahkan salah satu keputusan kongres yang diselenggarakan di Yogyakarta ini ialah mencegah perkawinan anak-anak.

Artinya, problema pernikahan anak sudah menyita perhatian perempuan pejuang sejak seabad silam. Bahkan Kongres Perempoean juga mengirimkan mosi kepada Pemerintah (Hindia Belanda) agar secepatnya diadakan *fonds* bagi janda dan anak-anak, tunjangan bersifat pensiun jangan dicabut dan sekolah-sekolah putri diperbanyak. Waktu

itu, sekolah dinilai dapat dan akan 'menghambat' atau menunda dilakukan pernikahan anak.

Barometer

Kini apa yang disampaikan Ketua Tim Kajian Pernikahan Dini DP3AP2 DIY seakan menjungkirbalikkan upaya yang sudah diperjuangkan cukup lama. Sebuah realita tidak mengenakkan dan mestinya menampar banyak pihak karena abai dalam memerhatikan anak, pemilik masa depan. Mengingat dengan pelbagai predikat : mulai Kota Pelajar, Kota Budaya, Kota Wisata, Yogya acapkali menjadi barometer nasional setelah Jakarta. Mengingat sejarah, dari Kota Yogyakarta lah pencegahan perkawinan anak dicetuskan secara resmi dan formal. Lantas bagaimana kepedulian dan perhatian terhadap anak di DIY ini?

Mengemban amanat sejarah Kongres Perempoean, fakta yang dipaparkan Tim Kajian Pernikahan Dini, tidak bisa dipandang sebelah mata. Realita ini terasa menyesakkan bagi siapa pun yang peduli masa depan bangsa : orang tua, pendidik, agamawan, wakil rakyat, budayawan terlebih para aktivis pejuang kesehatan reproduksi. Bukankah kita pernah diingatkan Sekjen PBB Kofi Annan (1997- 2006) : ..... *Apa yang terjadi pada millenium yang akan datang dapat dengan mudah direfleksikan dari seberapa jauh perhatian kita pada anak-anak saat ini.* □

*\*) Fadmi Sustiwi, jurnalis pemerhati kesetaraan perempuan dan anak.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Menguji Ketahanan Ekonomi UMKM

Wisnu Hermawan

Sebagai gudangnya ekonomi kreatif, ladang untuk berkreasi dan berekspresi harus terus dimunculkan dimana saja, di seluruh wilayah DIY. Berita KR (11/9) mengungkapkan bahwa sekurangnya 373 even digelar selama perayaan satu dasawarsa keistimewaan DIY dalam kurun waktu satu bulan. Sekurangnya lebih dari 10 even digelar dalam setiap harinya, belum lagi even-even yang digelar oleh swasta atau swadaya.

Tentunya, even itu bagaikan gula yang akan dikerubungi semut, dimana para pelaku UMKM selalu eksis dengan even-even kreatif yang digelar di Yogya. Artinya, pemda memiliki komitmen yang kuat untuk terus menjaga konsistensi ekosistem ekonomi daerah. Yang notabene banyak disangga pelaku UMKM yang banyak berkecimpung dalam sector industri kreatif.

Tentunya alokasi sumberdaya Pemda yang tidak seberapa dalam mengungkit perekonomian daerah itu, menjadi tumpuan ketika diprioritaskan kepada program kegiatan yang memiliki dampak menjaga ketahanan ekonomi rakyat. Dukungan pemberian subsidi ongkos kirim melalui Sibakul kepada pelaku UMKM ditengah situasi yang sulit ini, setidaknya memberikan jawaban yang membantu pemasaran produk.

**Bebas Ongkos Kirim**

Data Sibakul yang dikumpulkan sejak delapan bulan terakhir melalui menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro kecil yang diprioritaskan mendapat fasilitas be-

bas ongkos kirim ini, mampu meningkatkan tujuh kali lipat dari biaya ongkos kirimnya, yang jangkauannya hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, beberapa hal perlu diperhatikan terkait subsidi ongkir ini, seperti : masih tingginya tingkat kelolosan pelaku UMKM dalam kurasi produk karena literasi digital yang cukup rendah dan ketersediaan akses internet yang belum merata.

Untuk itu, upaya untuk memberikan skema pelatihan digital dan dukungan sarpras internet harus benar-benar diwujudkan, dalam perspektif kolaboratif dan saling support lintassector. Pemda sudah tidak lagi menunggu bola, tetapi harus aktif jemput bola dalam mendorong kampanye transformasi digital. Kita semua berharap, melalui ketahanan ekonomi UMKM yang dibangun secara organik, akan menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi. Harapannya, mampu menekan laju inflasi. □

*\*) Wisnu Hermawan, Kabid Layanan Kewirausahaan KUKM Diskop UKM DIY.*

Pojok KR

Presiden minta stop ketergantungan kedelai impor.  
-- Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan.  
\*\*\*  
Upaya banding Sambo ditolak.  
-- Demi nama baik Polri juga.  
\*\*\*  
BMPS DIY minta agar PTS jangan hanya membangun gedung terus.  
-- Membangun SDM juga sangat perlu.

*Berabe*

**Kedaulatan Rakyat**

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).  
**Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.  
**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan.  
**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.  
**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.  
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
**Semarang :** Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.  
**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.  
**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.  
**Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil : Drs M Thoha.  
**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.  
**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:**Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.